

KARAKTERISTIK PEMILIH DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PADA PEMILIHAN LEGISLATIF DALAM PERSPEKTIF TEORI PILIHAN PUBLIK

¹⁾Suhardi Junaidi, ²⁾Muhammad Rais Rahmat, ³⁾Adam Latif

¹⁾Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

²⁾Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

³⁾Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

suhardijunaidi99@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik pemilih di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam pemilihan legislatif. Sampel sumber data dalam penelitian ini adalah 8 orang berdasarkan teknik purposive sampling. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif digunakan oleh peneliti, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah untuk menarik kesimpulan. Dari beberapa responden sampai Peneliti menemukan bahwa masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang, terutama di daerah Dapil Dua memiliki beberapa karakteristik termasuk pemilih tradisional, pemilih rasional, dan pemilih skeptis.

Kata kunci: karakteristik pemilih dan teori pilihan publik

Abstract

The purpose of this study is to determine the characteristics of voters in Sidenreng Rappang regency in the election of the slative legislature. The sample of data sources in this study amounted to 8 people based on purposive samplinf technique. This type of research is descriptive qualitative. Data collection techniques used in this study were observation and interviews. The data analysis technique used in this study is qualitative analysis used by researchs, namely data collection, data reducation, data presentation, and the last step is drawing conclusions. The result of this study are the characteristics of voters in Sidenreng Rappang regency in the legislative election based on the results of interviews from several respondents so that the researchers found the results that the people of Sidenreng Rappang regency, especially in the two electoral districst have several characteristics, including traditional voters, rational voters, and skeptical voters.

Keywords: Characteristics of Voters and Choice Public Theory

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014, Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) dilaksanakan secara langsung. Pemilihan kepala daerah di kota/kabupaten, serta provinsi dilakukan langsung oleh warga negara yang memiliki hak pilih. Dalam sistem politik yang demokratis, rakyat berhak memilih wakil-wakil terpilih yang berkumpul di partai politik untuk duduk di parlemen dan juga berhak terlibat aktif dalam kontestasi politik itu sendiri. Proses demokrasi yang berlangsung di Indonesia mencatat sejarah baru, yakni pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung. Siapapun yang terpilih dalam hal ini diprioritaskan oleh kuantitas suara pemilih dan bukan lagi oleh rekayasa politik yang dilakukan oleh sejumlah elit partai (Gunardo, 2014: 93).

Salah satu pilar demokrasi adalah pemilihan umum, bagi negara demokrasi seperti Indonesia, pemilu dianggap sebagai simbol dan juga sebagai tolak ukur demokrasi. Pemilu adalah cara untuk menjalankan kedaulatan rakyat, di mana rakyat membuat pilihannya sendiri yang diyakininya. Artinya rakyat memiliki kekuasaan penuh untuk menentukan pemimpinnya, karena rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi. Pemilihan umum adalah suatu mekanisme dalam memilih orang-orang yang kemudian akan mengisi jabatan politik tertentu, dari jabatan presiden sampai wakil terpilih. Mereka yang dilantik akan menduduki jabatan di pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga desa. Indonesia adalah negara demokrasi, sehingga menjadi penting bagi Indonesia untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang diadakan setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum merupakan cara demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan pemerintahan dengan kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. Kekuasaan pemerintahan yang lahir dari pemilu adalah kekuasaan yang lahir dari bawah sesuai dengan kehendak rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemilihan umum bertujuan untuk menegakkan prinsip kedaulatan rakyat (Siti Waridah 2003).

Pemilihan kepala daerah atau yang selanjutnya disebut (Pilkada) adalah sarana bagi masyarakat di daerah untuk melaksanakan kegiatan pemilihan pimpinan secara langsung, umum, bebas, rahasia,

jujur, dan adil. Dalam pemilihan kepala daerah, rakyat berperan penuh dalam memilih wakil-wakil terpilih yang berhak menduduki parlemen dan struktur pemerintahan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pemilu diselenggarakan atas dasar prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud, dan pelaksanaannya harus memenuhi asas kebebasan, kejujuran, keadilan, kepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.

Pemilu dipengaruhi oleh perilaku pemilih itu sendiri. Perilaku pemilih erat kaitannya dengan cara individu berinteraksi dalam pemilihan umum, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan politiknya dan pilihan partai politik atau calon yang akan dipilih berdasarkan suku atau daerah pemilihan. Tingkat partisipasi masyarakat sebagai pemilih dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara sebagai bentuk sosialisasi pemilukada, masyarakat sering mengikuti kegiatan tersebut agar dapat terlibat aktif dan berpartisipasi dalam pemilihan umum.

Namun dalam pelaksanaan pemilukada banyak faktor yang mempengaruhi pemilih dalam memilih calon, di antaranya pemilih cenderung memilih calon berdasarkan agama, latar belakang keluarga, golongan dan status sosial, sifat dan kepribadian calon, ikatan kekerabatan, mendukung partai politik, mencatat kinerja atau kinerja yang terbukti, faktor kerugian bahkan dipengaruhi oleh penggunaan politik uang. Kini, tidak hanya politik uang yang menjadi ciri Pilkada di Indonesia, tetapi juga perilaku berbagai pemilih yang ikut meramaikan Pilkada.

Ramlan Surbakti (2010) melihat perilaku memilih sebagai partisipasi masyarakat dalam pemilu yang juga merupakan rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yaitu memilih atau tidak, dan jika memilih apakah akan memilih calon X atau calon Y. Perilaku pemilih dalam pemilihan pemilu adalah ekspresi dari kehendak dan perwujudan semua pilihan rasional mereka dalam memilih wakil. Perilaku pemilih juga sangat mempengaruhi karakteristik pemilih di suatu daerah. Keadaan masyarakat di Kabupaten Sidrap mengenai karakteristik pemilih pada saat pemilihan umum

menganggap alasan pemilihan calon legislatif pertama adalah janji yang telah dibuat dan juga kedekatan politik, artinya ada panggilan dari masyarakat. . sekitar untuk memilih kandidat tertentu. Kedua, alasan masyarakat memilih karena adanya pemberian sejumlah uang dari calon legislatif kepada masyarakat. Unsur politik yang masih menggunakan politik uang sebagai alat untuk meraih kekuasaan disebabkan oleh budaya masyarakat yang dianggap pragmatis dengan melihat segala sesuatu dari bentuk material.

Teori pilihan publik (*public choice theory*) dalam konteks pemilu sangat penting bagi kelangsungan roda pemerintahan di suatu negara. Bagaimana agenda politik disusun dalam suatu negara tergantung pada pilihan rakyat terhadap agenda yang ditawarkan melalui pemilihan umum. Hal ini sejalan dengan teori pilihan publik, dimana aktor politik peserta pemilu menawarkan berbagai kebijakan publik kepada publik dan pembeli kebijakan publik tersebut adalah pemilih yang memilih calon berdasarkan kebijakan yang mewakili masyarakat itu sendiri.

Anthony Downs dalam bukunya yang berjudul *An Economic Theory of Democracy*, pemilih yang rasional dianggap sebagai pemilih yang ideal. Pilihan politik yang dibuat oleh pemilih rasional dalam pemilu merupakan hasil pemikiran dan penilaian yang logis dan kritis. Pemilih yang rasional mempertimbangkan pro dan kontra dalam menentukan alternatif pilihan yang terbaik dan menguntungkan untuk kepentingan diri sendiri dan untuk kepentingan umum. Pemilih akan membandingkan pilihan dasar (visi, misi, program) yang ditawarkan oleh calon. Selanjutnya, penawaran kebijakan yang paling mendekati keinginan dan tuntutan pemilih memberikan peluang kepada calon untuk dipilih. Maka untuk mengetahui hal tersebut dapat dilihat dari perspektif teori pilihan publik menurut Buchanan bahwa teori pilihan publik dapat dilihat dari dua aspek yaitu

1. Pendekatan Catallaxy, ekonomi sebagai ilmu pertukaran. Aktor politik menawarkan berbagai kebijakan publik kepada publik. Pembeli kebijakan publik ini adalah para pemilih yang akan memilih kebijakan yang benar-benar dapat mewakili kebutuhan mereka.

2. Homo economicus, Konsep ini menjelaskan bahwa manusia cenderung memaksimalkan manfaat utilitas untuk dirinya sendiri karena dihadapkan pada kekurangan sumber daya. Dalam pasar politik, politisi sebagai aktor memaksimalkan kepuasan pribadi yang didorong oleh banyak faktor seperti gaji, reputasi publik, kekuasaan dan ruang untuk mengontrol birokrasi. Sedangkan pemilih akan mengontrol suaranya untuk mendapatkan kebijakan yang diinginkan.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang tergolong studi kasus intrinsik, di mana penelitian ini dilakukan berdasarkan minat pada kasus tertentu. Sampel sumber data dalam penelitian ini adalah 8 responden. Observasi dan wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang digunakan oleh peneliti seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Hubberman (Sugiyono, 2015) yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir penarikan kesimpulan.

Gambar 3.1. Teknik Analisis Data Kualitatif Menurut Miles dan Hubberman (Sugiyono, 2015)



C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ciri-ciri perilaku politik pemilih adalah sikap atau tipe seseorang untuk menentukan pilihannya dalam pemilihan umum. Karakteristik perilaku politik pemilih dalam penelitian ini dibagi menjadi tujuh jenis yaitu pemilih rasional, pemilih kritis, pemilih tradisional, pemilih skeptis, pemilih reaktif, pemilih responsif, dan pemilih aktif. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan peneliti dengan mewawancarai delapan responden, dari hasil wawancara tersebut

peneliti menemukan dan menyimpulkan bahwa karakteristik yang dimiliki oleh pemilih di dua daerah pemilihan Kabupaten Sidenreng Rappang antara lain,

1. Pemilih tradisional

Pemilih tradisional memiliki orientasi ideologis yang sangat tinggi dan tidak terlalu melihat kebijakan partai politik atau partisipasi sebagai hal yang penting dalam pengambilan keputusan. Pemilih tradisional menempatkan prioritas tinggi pada keintiman sosial budaya, nilai-nilai asli, pemahaman, dan agama sebagai ukuran memilih partai politik. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa mereka yang dikenal atau individu yang tinggal di sekitar wilayah tersebut, ikatan keluarga merupakan hal yang sangat memprihatinkan masyarakat dan menjadi alasan utama dalam memilih calon yang sah.

Biasanya tipe pemilih ini mengutamakan sosok dan kepribadian pemimpinnya. Orang saat ini lebih memilih angka daripada pesta. Jika jumlahnya bagus, orang juga akan menganggap pihak yang menempatkannya juga bagus. Salah satu ciri dasar pemilih tipe ini adalah rendahnya tingkat pendidikan dan konservatisme dalam memegang nilai-nilai dan keyakinan yang dianut, sehingga pemilih tradisional juga merupakan tipe pemilih yang dapat dimobilisasi pada masa kampanye karena tingginya loyalitas. adalah salah satu fitur yang paling menonjol dari tipe pemilih ini. Pemilih jenis ini biasanya didominasi oleh orang tua yang pada dasarnya belum tuntas dan bahkan belum pernah berkecimpung di dunia pendidikan, sehingga mereka menilai sosok seorang calon legislatif berdasarkan kepribadian yang mereka amati tentang orang tersebut.

2. Pemilih rasional

Pemilih yang rasional memiliki ciri-ciri yang kurang berorientasi ideologis kepada partai atau pesertanya. Faktor-faktor seperti pemahaman, asal usul, nilai-nilai tradisional, budaya, agama, dan psikografi juga dipertimbangkan, tetapi tidak penting. Yang terpenting untuk tipe pemilih ini adalah apa yang bisa dan/atau dilakukan oleh suatu partai atau peserta dalam mewakili dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, sehingga berdasarkan hasil wawancara sebelumnya peneliti menyimpulkan bahwa tipe ini lebih fokus. atas bukti nyata berupa visi dan misinya oleh peserta atau calon legislatif dan bukan pemahaman atau nilai-

nilai partai atau peserta itu sendiri. Masyarakat pada umumnya akan memperhatikan visi dan misi yang ditawarkan oleh para caleg, apakah visi dan misi ini sejalan dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat daerah. Visi dan latar belakang caleg. Akankah visi dan misi yang diemban para calon sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat.

Tipe pemilih rasional ini umumnya diwakili oleh komunitas intelektual atau kelas terpelajar yang minimal memiliki gelar SLTA atau sederajat. Pemilih jenis ini sangat memahami proses demokrasi yang akan dilaksanakan sehingga benar-benar akan memilih calonnya dengan baik berdasarkan kriteria yang diperlukan dan kredibel untuk mewakili masyarakat. Tipe ini juga merupakan pemilih rasional, pemilih rasional yang aktif dalam politik dan bertindak atas prinsip-prinsip yang tidak hanya untuk kepentingannya sendiri, tetapi juga untuk kepentingan umum. Sehingga mereka benar-benar fokus pada visi dan misi yang direncanakan oleh para peserta untuk mengetahui apakah sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Sebelum pemilu, masyarakat membutuhkan calon yang mampu memberikan keyakinan tentang apa yang akan ditawarkan ketika terpilih, hal ini tertuang dalam visi dan misi.

3. Curiga terhadap pemilih

Pemilih skeptis adalah pemilih yang tidak memiliki orientasi ideologis yang cukup tinggi terhadap suatu partai politik atau peserta, atau sesuatu yang penting. Keinginan untuk terlibat dalam partai politik pada pemilih jenis ini sangat rendah, hal ini karena ikatan ideologis mereka memang rendah. Mereka juga kurang peduli dengan program kerja atau '*platform*' dan kebijakan partai politik. Dalam beberapa hal, pemilih jenis ini lebih mengedepankan pragmatisme, misalnya karena politik uang. Seperti hasil wawancara sebelumnya, peneliti menyimpulkan tentang karakteristik pemilih di dua daerah pemilihan yang cenderung skeptis. Saya melihat orang memilih karena ada uang, ketika ada uang, hak memilih dengan mudah diberikan, karena semua tentang uang.

Politik uang sebagai bentuk pragmatisme politik tidak serta merta berarti memberikan sejumlah uang kepada calon pemilih, tetapi bisa dalam bentuk yang relatif *lunak* agar tidak terkesan

“membeli” suara seperti bantuan pangan, pembangunan masjid dan sebagainya. pada. Pemilih jenis ini biasanya enggan untuk berpartisipasi aktif dalam dunia demokrasi, mereka cenderung begitu saja Mencabut kewajiban untuk memberikan hak pilihnya. Selain rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman dua negara demokrasi yang kurang terlayani, mereka akan memilih kandidat yang menurut mereka akan menguntungkan mereka. calon legislatif banyak yang memberikan uang atau barang kepada publik dan itu diberikan saat mendekati waktu pemilu.

Jenis pemilih dijelaskan sebelumnya yang merupakan ciri khas dari pemilih di Kabupaten Sidenreng Rappang khususnya di daerah pemilihan kedua, secara keseluruhan didominasi oleh pemilih rasional. Hal ini terbukti dari hasil wawancara yang dilakukan oleh para peneliti bahwa setelah analisis ternyata informasi yang diberikan oleh mayoritas responden mengarah ke karakteristik pemilih rasional. Pemilih tradisional menempatkan prioritas tinggi pada keintiman sosial budaya, nilai-nilai asli, pemahaman, dan agama sebagai ukuran memilih partai politik. Mereka yang dikenal atau individu yang tinggal di sekitar wilayah tersebut, yang kemudian Ikatan keluarga merupakan hal yang sangat memprihatinkan masyarakat dan menjadi alasan utama dalam memilih calon yang sah.

Tipe pemilih ini mengutamakan sosok dan kepribadian pemimpinnya, orang saat ini lebih memilih angka daripada pesta. Jika jumlahnya bagus, orang juga akan menganggap pihak yang menempatkannya juga bagus. Salah satu ciri dasar pemilih tipe ini adalah rendahnya tingkat pendidikan dan konservatisme dalam memegang nilai-nilai dan keyakinan yang dianut, sehingga pemilih tradisional juga merupakan tipe pemilih yang dapat dimobilisasi pada masa kampanye karena tingginya loyalitas. adalah salah satu fitur yang paling menonjol dari tipe pemilih ini. . Pemilih jenis ini biasanya didominasi oleh orang-orang tua yang pada dasarnya belum tamat bahkan belum pernah berkecimpung di dunia pendidikan, sehingga mereka menilai sosok seorang calon legislatif berdasarkan kepribadian yang mereka amati tentang orang tersebut.

Ciri seorang pemilih adalah sikap atau tipe seseorang untuk menentukan pilihannya dalam pemilihan umum. Sedangkan teori

pilihan publik adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana pemerintah mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik dan berfungsi sebagai pedoman bagi pengambil keputusan untuk membuat pilihan kebijakan yang lebih efektif. Sehingga teori pilihan publik erat kaitannya dengan pemilih. Buchanan menjelaskan bahwa konsep pilihan publik bukanlah teori yang sempit, melainkan sebuah perspektif. Yang dimaksud dengan “perspektif pilihan publik adalah bahwa dalam membahas dan memaknai konsep pilihan publik dapat membantu analisis untuk mendapatkan fokus pada catatan umum dari konsep ini. Pilihan publik adalah perspektif bidang politik yang muncul dari pengembangan dan penerapan alat dan metode ekonomi untuk proses pengambilan keputusan kolektif dan berbagai fenomena non-pasar.

Ekonomi dianggap sebagai ilmu pertukaran di mana aktor politik menawarkan berbagai kebijakan publik kepada publik. Kemudian masyarakat sebagai pembeli polis memilih polis yang benar-benar dapat mewakili kebutuhan mereka. Hal ini sejalan dengan karakteristik pemilih yang rasional. Mereka memiliki ciri bahwa mereka secara ideologis tidak begitu peduli dengan partai atau peserta, tetapi yang terpenting adalah apa yang dapat dan/atau telah dilakukan oleh partai atau peserta dalam mewakili dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Jadi apa yang bisa diberikan seorang calon legislatif kepada mereka nanti dan itu sesuai dengan apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Masyarakat pada umumnya akan memperhatikan visi dan misi yang ditawarkan oleh para caleg, apakah visi dan misi ini sejalan dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat daerah. Visi dan latar belakang caleg. Akankah visi dan misi yang diemban para calon sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat.

D. KESIMPULAN

Karakteristik pemilih di Kabupaten Sidenreng Rappang pada Pemilu Legislatif yang hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa karakteristik pemilih yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang khususnya di dua daerah pemilihan tersebut antara lain:

1. Pemilih tradisional, yang memiliki orientasi ideologis yang sangat tinggi dan tidak terlalu melihat kebijakan partai politik atau partisipan sebagai hal yang penting dalam pengambilan keputusan.
2. Pemilih rasional, yang memiliki ciri-ciri yang kurang berorientasi ideologis kepada partai atau peserta.
3. Pemilih yang skeptis, yang tidak memiliki orientasi ideologis yang cukup tinggi kepada partai atau peserta politik, juga pada sesuatu yang penting.

Ketiga tipe pemilih di atas yang merupakan ciri-ciri pemilih di Kabupaten Sidenreng Rappang, khususnya di daerah pemilihan kedua, secara keseluruhan didominasi oleh pemilih yang rasional. Teori pilihan publik berkaitan erat dengan pemilih. *Pilihan publik* adalah perspektif bidang politik yang muncul dari pengembangan dan penerapan alat dan metode ekonomi untuk proses pengambilan keputusan kolektif dan berbagai fenomena non-pasar.

Ekonomi dianggap sebagai ilmu pertukaran di mana aktor politik menawarkan berbagai kebijakan publik kepada publik. Kemudian masyarakat sebagai pembeli polis memilih polis yang benar-benar dapat mewakili kebutuhan mereka. Hal ini sejalan dengan karakteristik pemilih yang rasional. Mereka memiliki ciri bahwa secara ideologis mereka tidak begitu peduli dengan partai atau peserta, tetapi yang terpenting adalah apa yang dapat dan/atau telah dilakukan oleh partai atau peserta tersebut dalam mewakili dan memperjuangkan aspirasi rakyat.

E. REFERENSI

- Abdillah, J. (2019)). Karakteristik Pemilih Milenial Pada Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 Di Desa Kracak Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas. 1–58.
- Ahmad, J. (2015). *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Gava Media.
- Arifin, A. (2003). *Komunikasi Politik: Paradigma Teori Aplikasi dan Komunikasi Politik Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Budiadjo, M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia.
- Darmawan, I. (2015). *Keterlibatan Selebriti dalam Pemilu Indonesia Pasca Orde Baru*.
- Efriza. (2012). *Political Explore*. Bandung: CV Alfabeta.
- Fahmi, M. H. (2020). Perilaku Pemilih Masyarakat Kabupaten Lamongan Pada Pilpres. *Paradigma*, 9(1).
- Fauzi, A. M. (2019). Perilaku pemilih menjelang Pemilu. *Journal of Islamic Civilization*, 1(1), 40-48.
- Fitri, N. (2015). Hubungan Karakteristik Pemilih, Konsumsi Media, dan Interaksi Peergroup, Dengan Perilaku Pemilih Pada Pemilihan Presiden 2014 di Kabupaten Brebes . *Master Program in Communication Science, Doctoral dissertation*.
- Goyena, R. (2019). analisis pemahaman konsep tentang nilai wawasan kebangsaan dan patriotisme melalui pembelajaran sejarah di SMA Negeri 1 Wonosari. *J. Chem. Inf. Model*, 53, 1689–1699 .
- Iksan, M. P. (2014). pengaruh Perilaku Pemilih Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Walikota Kota Pagaralam Putaran Kedua (Studi Perilaku Pemilih Di Kecamatan Pagaralam Utara). 45–48 .
- Razak, M. R. (2020). Implementasi Kebijakan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap di Kabupaten Enrekang.
- Razak, M. R. (2020). Pengaruh Perilaku Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Salah, L. B. (2014). Karakteristik pemilih, konsumsi media, interaksi peergroup dengan perilaku pemilih.

Sekaran, U. (2011). *Research Methods for Business*. Jakarta: Selemba Empat.

Subakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia.

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Administrasi. Edisi ke-10*. Bandung: Alfabeta .

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Zedadra, O. e. (2019). Perilaku Pemilih Masyarakat Kabupaten Lamongan Pada Pilpres 2019. *Sustain*, 11, 1–14.

Undang-undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Asas-asas dalam Pemilihan Umum.